

Penanganan Soal Lingkungan Lemah Hasil Survei Walhi: Kualitas Semakin Memburuk

Survei Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di lima kota besar menunjukkan kualitas lingkungan semakin memburuk. Di sisi lain, kapasitas lembaga negara, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk menangani persoalan lingkungan dinilai sangat lemah. Survei yang dilakukan di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru, dan Banjarmasin pada Januari 2014 dengan melibatkan 1.920 responden ini juga melihat persepsi publik terhadap calon presiden dan wakil presiden yang pro lingkungan. Hasilnya, Joko Widodo dianggap sangat peduli lingkungan 45,5 persen, disusul Prabowo Subianto 13,5 persen, Jusuf Kalla 7 persen, dan Hatta Rajasa 5,75 persen.

Hasil survei ini disampaikan oleh peneliti senior Walhi Institute, Abdul Wahib Situmorang, di Jakarta, Senin (23/6). "Metode pemilihan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat Komisi Pemilihan Umum di setiap kota," kata dia. "Tingkat kesalahan survei 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," ujar Wahib. Dia menyebutkan, survei opini publik tentang kondisi lingkungan hidup ini meliputi empat aspek, yaitu kondisi fisik dan penanganannya, kapasitas kelembagaan pemerintah, kepemimpinan negara, serta partisipasi masyarakat.

Kondisi fisik lingkungan hidup meliputi kualitas air bersih, sungai, dan udara dipersepsikan responden dalam kondisi buruk. Misalnya, kualitas sungai, rata-rata responden menyebutkan kondisinya berbau, keruh, dan kotor sebanyak 53,6 persen. Meski buruk, penanganan pencemaran sungai tidak dilakukan serius. Rata-rata responden berpendapat penanganan biasa saja (50 persen), buruk (30 persen), dan sangat buruk (8 persen). Sisanya menyebutkan sangat baik (7 persen), baik (11 persen), dan lain-lain (2 persen).

Kualitas udara, responden menyebutkan kondisinya buruk (34 persen), biasa saja (24 persen), baik (20 persen), sangat buruk (11 persen), sangat baik (4 persen), dan lain-lain (6 persen). Kondisi ini berkebalikan dengan penanganannya karena rata-rata responden berpendapat biasa saja (48 persen), buruk (25 persen), dan sangat buruk (10 persen). Sisanya mengatakan sangat baik (2 persen), baik (10 persen), dan sisanya tidak berpendapat. Penanganan banjir juga dinilai tak menunjukkan prestasi. "Survei ini menunjukkan penilaian publik terhadap kemampuan pemerintah sangat rendah sehingga perlu terobosan baru memperbaiki situasi agar persoalan lingkungan semakin besar," kata Wahib.

Pembanding

Deni Bram, pengajar dari Fakultas Hukum Lingkungan Universitas Tarumanagara, mengatakan, survei Walhi bisa menjadi pembanding dari riset yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). "Sebagai perbandingan, riset KLH 2013 menyebutkan, perilaku masyarakat peduli lingkungan di 12 provinsi secara nasional rata-rata di atas 0,57 persen dari skala 0-1," kata dia.

Menurut Deni, kualitas lingkungan di Indonesia memang terus merosot. Berdasarkan indeks performa lingkungan negara se-ASEAN 2012, Indonesia berada di posisi kedua dari bawah (peringkat ke-8 dari 10) dengan nilai 52,29 dari skala 100. "Walaupun publik juga diharapkan ikut berperan memperbaiki lingkungan, berdasarkan undang-undang, negara paling bertanggung jawab," ucap dia.

Abet Nego Tarigan, Direktur Walhi Nasional, mengatakan, dari temuan riset semakin meyakinkan tentang perlunya memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis. "Konflik sumber daya alam dan agraria meluas akibat kebijakan yang keliru, menambah krisis rakyat, di tengah sumber daya alam yang terkuras bukan untuk kesejahteraan rakyat," ujar dia. (AIK)